

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Cegah Remunerasi Dokter Dipotong

## Palmerah, Warta Kota

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati buka suara soal aksi demo yang dilakukan pegawai hingga dokter di Rumah Sakit Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (3/6/2024). Para tenaga kesehatan (nakes) tersebut mempertanyakan hak remunerasi mereka.

Ani mengklaim, pihaknya telah memfasilitasi tuntutan yang disampaikan oleh para tenaga kesehatan itu.

"Sehubungan penyampaian aspirasi oleh pegawai RSKD Duren Sawit, Dinkes DKI telah melakukan fasilitasi kepada kedua pihak," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (6/6/2024).

Ia pun menyebut, pemerintah saat ini tengah menggodok revisi Peraturan Gubernur (Pergub)

Nomor 51 Tahun 2021 tentang Remunerasi.

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini pun memastikan pihaknya bakal meningkatkan pengawasan terkait pemberian remunerasi sehingga tak ada penyelewengan dalam penyalurannya.

"Dinkes akan membentuk tim untuk monitoring dan pendampingan dalam pengelolaan remunerasi ini," ujarnya.

Sebelumnya, puluhan pegawai Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur berunjuk rasa mempertanyakan hak remunerasi mereka pada Senin (3/6/2024).

## Audit BPK

Juru Bicara Pegawai RSKD Duren Sawit,

drg. Mirza mengatakan aksi tersebut dilakukan setelah pihaknya mengetahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait remunerasi yang tak sesuai.

Bahwa dari hasil audit BPK, remunerasi atau imbal jasa ratusan pegawai RSKD Duren Sawit meliputi tenaga kesehatan hingga sopir diduga dimanipulasi dan dipotong selama 14 tahun.

"Hasil audit BPK ketemu bahwa permainan menaik-naikan level remunerasi. Ketika mengetahui temuan BPK kami kaget bukan main," kata Mirza di Jakarta Timur, Selasa (4/6/2024).

Dalam pembagian remunerasi terdapat level 1 hingga 14, di mana level 14 atau paling tinggi untuk jabatan pimpinan RSKD Duren Sawit dan

level 1 paling bawah untuk posisi sebagai sopir.

Tapi karena diduga ada manipulasi pegawai RSKD Duren Sawit yang berada di level 6 menerima remunerasi posisi level 8, sehingga imbalan didapat satu pihak lebih besar dan satu pihak lebih kecil.

Menurutnya potongan remunerasi setiap pegawai dapat mencapai Rp 2 juta per orang, sehingga bila pemotongan diakumulasi sejak tahun 2010 maka kerugian mencapai miliaran rupiah. "Memainkan levelnya, misal level enam tapi dibagikan nomor delapan. Jadi naik dua kali lipat. Nah itu kan merugikan yang lain. Itu kena seluruh pegawai, banyak pegawai dirugikan, resah," ujarnya.

Mirza menduga manipulasi dan pemotongan

remunerasi terhadap ratusan pegawai RSKD Duren Sawit dilakukan seorang oknum pejabat yang kini dinonaktifkan dari jabatannya.

Hanya saja sosok itu hingga kini tidak diberhentikan dengan alasan tenaga dan kemampuannya masih dibutuhkan RSKD Duren Sawit, sehingga disesalkan para pegawai.

Para pegawai sudah berupaya mengonfirmasi langsung kasus kepada pimpinan RSKD Duren Sawit, tapi jawaban diberikan tidak memuaskan sehingga mereka memilih berunjuk rasa.

"Walaupun sudah dinonaktifkan karena terbukti korupsi dia (oknum pegawai) masih dipakai buat membagi (remunerasi) lagi. Makannya ini isu yang diangkat saat kita demo," tuturnya. (TribunJakarta)